

## **BAB II**

### **POLITIK LUAR NEGERI & HUBUNGAN DIPLOMATIK YORDANIA-ISRAEL**

Perjanjian damai tahun 1994 adalah salah satu bentuk kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Yordania dalam aktivitas internasionalnya. Perjanjian tersebut menjadi awal dari hubungan diplomatik yang terjalin dengan israel.

Berbagai tindakan luar negeri tentunya dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti aktor lain ataupun fenomena internasional yang sedang terjadi. Oleh karena itu, untuk memperbanyak data dalam menganalisis, pada bab ini penulis akan menjelaskan pemahaman dasar terkait politik luar negeri Yordania di dunia Internasional serta hubungan diplomatik yang terjadi antara Yordania-Israel selama perjanjian damai berlangsung.

#### **A. Politik Luar Negeri Yordania**

Politik Luar Negeri merupakan hal yang penting dan perlu dilakukan oleh setiap negara untuk memenuhi kepentingan. Kebijakan luar negeri suatu negara dibuat untuk melindungi ataupun memenuhi kepentingannya masing-masing, hal ini juga dilakukan oleh Yordania dalam politik luar negerinya. Yordania memiliki tiga kebijakan utama dalam politik luar negerinya dimana kebijakan ini bertujuan memenuhi kepentingan jangka panjangnya, terdiri dari Program Restrukturisasi Ekonomi, Demokratisasi dan HAM serta Proses Perdamaian Arab-Israel.

##### **1. Program Restrukturisasi Ekonomi**

Perang Arab dan Perang Teluk beberapa dekade lalu telah mempengaruhi perekonomian Yordania, dimana negara tersebut beberapa kali harus menghadapi krisis ekonomi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk merestrukturisasi dan merevitalisasi ekonomi Yordania. Salah satunya dengan membuat kebijakan yang berbentuk program yang dirancang untuk menarik bantuan ataupun pinjaman dan pengurangan utang yang berguna untuk mengurangi beban ekonomi negara. Yordania juga melakukan berbagai perjanjian ekspor-impor serta pembukaan pasar bebas untuk menarik

investasi dari pihak luar (The Hashemite Kingdom of Jordan, 1998). Semua ini adalah contoh negara yang berupaya memaksimalkan kepentingannya dengan melakukan tindakan eksternal yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Yordania mencoba membuka pasar bebas serta menarik para investor dengan menegosiasikan FTA atau *Free Trade Agreement* dengan tujuan memenuhi syarat untuk Kawasan Ekonomi Khusus dimana industri regional dapat menemukan, memproduksi dan menjual produknya ke banyak negara dengan bebas dengan bebas kuota, bea cukai ataupun tarif.

FTA adalah perjanjian perdagangan pertama yang memasukkan ketentuan substantif yang membahas perdagangan, sebuah langkah yang harus membantu memajukan agenda perdagangan bebas global dalam sektor yang penting bagi perusahaan teknologi tinggi dan multimedia Amerika Serikat. Perjanjian ini akan berlaku sebagai perjanjian perdagangan bebas ketiga Amerika, dan yang pertama dengan negara Arab. FTA antara AS dengan Yordania ditandatangani pada 24 Oktober 2000. FTA adalah tonggak awal dari kerjasama AS-Yordania yang tumbuh dalam hubungan ekonomi. Dimulai dengan kerjasama bilateral yang erat tentang akses ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan diikuti oleh kesimpulan dari perjanjian kerangka kerja perdagangan dan perjanjian investasi bilateral. FTA Yordania mencapai liberalisasi yang signifikan dan luas di berbagai spektrum masalah perdagangan. Ini akan menghilangkan semua hambatan tarif dan non-tarif terhadap perdagangan bilateral AS-Yordania dalam hampir semua barang industri dan produk pertanian (The White House, 2001).

Selain bidang perdagangan dan investasi, Yordania juga mengandalkan *Foreign Direct Investment* yaitu bentuk investasi yang didorong oleh kemitraan asing atau domestik, bertujuan menghasilkan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, keterampilan alih teknologi dan juga meningkatkan ekspor dan berkontribusi pada pertumbuhan

ekonomi jangka panjang negara-negara berkembang di dunia (The American Chamber of Commerce in Jordan , 2019).

Menurut Presiden *Jordan Investment Commision* Shahadeh mengatakan bahwa faktor geopolitik juga memiliki peran besar dalam mempengaruhi *Foreign Direct Investment*. Melihat dari aspek geografi Yordania yang bertetangga langsung dengan negara-negara berkonflik seperti Palestina dan Syria menjadikannya sebagai area terdekat bagi para refugees untuk melarikan diri dari wilayah berkonflik. Hal inilah yang menjadikan bantuan luar negeri sejak dahulu telah berperan besar dalam perekonomian dan pertumbuhan ekonomi Yordania.

Selain bantuan dari AS, Yordania juga bergantung pada investasi besar-besaran dari Negara-negara Teluk. Berdasarkan data dari Bank dunia, bantuan ke Yordania pada tahun 2003-2005 menunjukkan beberapa pendonor terbesar bantuan adalah Amerika Serikat mencapai \$368 juta dan UNRWA sebesar \$96 juta. Pada 2008, AS memberikan bantuan keuangan, militer dan pembangunan hingga mencapai \$660 juta (Al-Khaldi, 2008). Investasi asing ini terus meningkat pada 2006 mencapai \$842 juta dengan dukungan total ditambah bantuan pembangunan mencapai \$1,3 miliar (Marcopolis, 2010).

Namun dukungan ini tidak selalu meningkat, tahun 2008 merupakan titik semakin menurunnya kapabilitas ekonomi Yordania, saat terjadi krisis ekonomi internasional serta ketidakstabilan geopolitik karena banyaknya konflik regional menghalangi investor asing yang berujung dengan penurunan jumlah investasi (Export Entreprises SA, 2019). Bahkan hingga tahun 2017, GDP yordania hanya mencapai 2% dan semakin menurun pada 2018 yang hanya mencapai 1,8% dengan defisit pada current account mencapai \$829,1 juta (World Bank, 2019).

Krisis yang terjadi ini pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor seperti masalah-masalah di kawasan atau eksternal yang berdampak pada perekonomian Yordania. Seperti adanya pembengkakan pengungsi yang masuk,

menjadikannya sebagai salah satu negara penerima pengungsi terbesar. Semakin besarnya jumlah pengungsi yang besar ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan biaya kesehatan, pendidikan serta adanya gangguan pada jalur perdagangan (Turnbul, 2019).

Terganggunya jalur perdagangan menyebabkan defisit perdagangan yang sangat besar terlebih lagi dengan kurangnya sumberdaya alam serta produk-produk makanan di Yordania menyebabkan ketergantungan yang sangat besar pada bantuan luar negeri. Hal ini diperburuk dengan ketegangan politik antara Yordania dengan negara-negara teluk seperti Irak, Suriah dan Israel, sehingga suntikan dana yang diperoleh Yordania menjadi lebih sedikit dan terbatas (Export Entreprises SA, 2019).

Faktor lain diakibatkan dari banyak indikator seperti pengangguran di Yordania yang meningkat sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja menurun. Pada 2019 tingkat pengangguran di Yordania mencapai 19,2% lebih tinggi dari tahun 2018 yang mencapai 18,8% (Ellyatt, 2018). Meningkatnya pengangguran ini tentu akan mempengaruhi produktifitas dari raykat negaranya yang berdampak pada pertumbuha GDP negara.

## **2. Demokratisasi dan Hak Asasi Manusia**

Untuk membahas demokratisasi sebagai salah satu kebijakan utama dalam politik luar negeri Yordania, penting untuk terlebih dahulu mengenal sistem demokrasi yang ada di negara tersebut. Politik dalam negeri ini tentu dapat mempengaruhi tindakan, perilaku serta politik luar negeri yang nantinya akan diterapkan oleh Yordania.

Demokratisasi yang berkembang di Yordania cenderung menganut konsep demokrasi dari Amerika Serikat. Reformasi politik Raja Hussein yang ekstensif pada tahun 1989 memperkenalkan proses pemilihan umum yang bebas dan adil ke Majelis Rendah. Itu disertai dengan tingkat kebebasan pers, dan reformasi ekonomi agar lebih sesuai dengan tatanan dunia global. Demokratisasi di Yordania ini cenderung cukup unik karena tidak mengikuti model

diplomasi seperti di Amerika Latin, Asia Timur, ataupun Eropa Timur. Menurut Glen Robinson, Konsep demokrasi yang digunakan di Yordania berbentuk “*Defensive Democratization*”. Dimana praktik demokrasi yang dilakukan masih memiliki batasan tertentu seperti batasan hak dan kebebasan ataupun melindungi suatu lembaga-lembaga tertentu (Robinson, 1998).

Demokratisasi di Yordania ini cenderung belum menjadi agenda utama dalam sistem politik di negara tersebut. Bentuk demokratisasi yang *defensive* bisa dilihat salah satunya melalui pemilihan elit politik. Walaupun ada proses pemilihan umum untuk untuk majelis rendahnya, otoritas Raja masihlah sangat kuat seperti pada pemilihan Perdana Menteri, anggota parlemen, pemimpin militer dan pemimpin lainnya (Yani, 2014).

Praktik demokrasi seperti ini dirancang dengan tujuan sebagai pencegahan dan mempertahankan hak istimewa dari para elite sambil membatasi daya tarik terhadap perubahan politik ditengan trend demokratisasi. Strategi ini dianggap seperti topeng yang menunjukkan dukungan Yordania terhadap demokrasi tanpa menggoyahkan kekuasaan para elitnya. Rezim telah dengan terampil mengelola dan mengarahkan suatu proses yang telah secara keseluruhan melindungi empat pilar kekuasaan di Yordania: monarki dan kotanya, tentara dan layanan keamanan, elit bisnis yang kaya, dan para pemimpin.

Demokratisasi merupakan sebuah kekuatan sosial yang secara hukum dapat melemahkan dan menghancurkan kebijakan rezim utama Yordania yang pada dasarnya adalah berbentuk monarki. Oleh karena itu, ditengah meluasnya *Arab Spring* dan ditambah berbagai krisis dalam negeri maupun kawasan, rezim haruslah melakukan reformasi demi mempertahankan kuasa perpolitikannya tanpa mengubah struktur inti dari kekuasaan Yordania itu sendiri (Robinson, 1998).

Negara-negara di Timur Tengah memang belum banyak yang menganut sistem politik yang demokratis, dan

mayoritas masih berbentuk kerajaan otoriter (monarki) dan sebagainya. Sedangkan demokratisasi di Yordania dimulai sebelum adanya penandatanganan perjanjian damai dengan Israel. Meskipun sistem hukum Yordania memiliki kekurangan, keadaan hak asasi manusia dan demokrasi telah mengalami perbaikan selama dekade terakhir dibandingkan dengan sebagian besar negara-negara Arab. Salah satu bentuk praktiknya adalah pelaksanaan pemilihan umum parlemen yang pertama kali dilakukan pada tahun 1989. Selain itu, Yordania juga dianggap contoh yang baik dalam melakukan praktik demokrasi dan aktif dalam mempromosikan demokrasi sebagai sistem politik di kawasan timur tengah (Vig, 2017).

### **3. Proses Perdamaian Arab-Israel**

Partisipasi Yordania dalam perdamaian antara negara-negara Arab dengan Israel bisa dilihat dari partisipasinya dalam mengatasi konflik yang terjadi antara Palestina-Israel. Posisinya yang berbatasan langsung dengan Israel dan Palestina serta banyak penduduknya yang berasal dari Palestina dan keturunan Palestina membuat Yordania memiliki peran yang besar dalam konflik tersebut.

Selain itu juga sesuai dengan isi Perjanjian Damai tahun 1994 dimana para penguasa Yordania diakui dan memiliki peran besar sebagai pelindung tempat-tempat suci umat muslim yang ada di Yerusalem. Pengakuan ini diperkuat juga dengan adanya kesepakatan antara Raja Abdullah II dengan Presiden Palestina Mohammad Abbas pada tahun 2013 lalu. Peran Yordania dalam melindungi situs-situs Islam di Yerusalem sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1967 pada Perang Enam Hari, dimana Yordania berusaha untuk melindungi Yerusalem dari akuisisi Yahudi pada saat itu (Haaretz, 2013).

Yordania juga ikut berpartisipasi dalam pembuatan gagasan perdamaian antara Israel dengan Koalisi Arab. Dimana Israel harus mengakhiri pendudukannya di Tepi Barat (termasuk Yerusalem Timur) dan Gaza sesuai dengan implementasi Resolusi 242 dan 338 Dewan Keamanan PBB,

menerima negara Palestina yang merdeka di wilayah-wilayah tersebut dengan ibukotanya di Yerusalem Timur, dan menerima 'solusi adil' untuk mengatasi masalah pengungsi Palestina yang dimana akan disepakati sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB 194. Sebagai imbalannya menawarkan Israel mengakhiri konflik Arab-Israel, bersama dengan perdamaian komprehensif dan hubungan normal. Resolusi ini yang kemudian dikenal sebagai API atau *Arab Peace Initiative* (Mekelberg, 2019).

Dilihat dari penjelasan diatas dapat dilihat berbagai peran Yordania dalam menjaga stabilitas di kawasan Timur Tengah. Partisipasinya dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan ternyata tidak hanya menguntungkan dalam menjaga perdamaian, namun stabilitas yang dicapai oleh perdamaian ini juga telah membawa manfaat peningkatan investasi serta ledakan di sektor pariwisata Yordania.

Tiga kebijakan utama dari Yordania dalam politik luar negerinya ini tentu menghasilkan manfaat maupun kerugian yang dapat mempengaruhi perekonomian, keamanan negara serta posisi Yordania di kancah internasional. Berbagai strategi kebijakan luar negeri dan kerjasama dilakukan dengan berbagai negara dan salah satu partner diplomatik Yordania yang cukup signifikan adalah Israel.

## **B. Hubungan Yordania dengan Israel**

### **1. Israel bagi Yordania**

Setelah Yordania melakukan kerjasama dengan Israel, berbagai kritik diterima oleh Yordania yang sebagian besar didasari oleh bagaimana perjanjian tersebut akan mempengaruhi Palestina dan Konflik-Arab-Israel yang akan meluas. Tindakan Yordania dianggap mengkhianati Palestina dan Arab sekutunya. Namun mengabaikan kritikan tersebut, Yordania tetap mengutamakan kepentingan strategis nasionalnya.

Salah satu alasan penandatanganan perjanjian pada awalnya akibat Yordania yang terisolasi dan mengalami kerugian ekonomi yang sangat besar setelah Perang Teluk

tahun 1991 setelah menjadi sekutu Irak pada saat itu. Kekalahan dan sanksi perang yang diberikan kepada Irak membuat Yordania kehilangan pemasok minyak diskon serta mitra dagang terbesarnya menyebabkan ekonominya mengalami kehancuran.

Yordania kehilangan ratusan juta dolar suntikan bantuan tahunan dari negara-negara Teluk, menyebabkan Yordania harus keluar dari pasar kerjasama dan ratusan ribu warganya terusir. Pengangguran menjadi melonjak hingga 30%, penduduk mengalami kemiskinan dan sektor pariwisata terhenti. Yordania kehilangan \$4 milyar dalam 8 bulan pertama pasca perang. Untuk mengatasi hal ini pun, Yordania mencoba mencari dan menerima bantuan internasional, termasuk salah satunya berasal dari perjanjian damai dengan Israel (Nashashibi, 2014).

Bagi Yordania, perjanjian tersebut dapat memfasilitasi reorientasi dari kubu Irak, membuka sumber-sumber baru bantuan ekonomi dan militer dari Barat. Selain itu juga dapat memperkuat posisinya sebagai salah satu negara timur tengah yang pro-Barat (Schenker, 2014).

Yordania saat itu berada di posisi wilayah yang sedang bergejolak, namun secara militer lemah dan miskin secara ekonomi, sehingga sulit untuk menyeimbangkan dan memastikan keamanannya menghadapi ketegangan dengan negara tetangganya. Yordania percaya perjanjian dengan Israel akan menghasilkan keuntungan lebih banyak dan tidak memerlukan konsesi yang besar sebagai imbalan, dari pada harus menghadapi perang berkelanjutan dengan musuh yang lebih kuat (Nashashibi, 2014).

Kerja sama mereka mengatasi sebagian besar negosiasi Arab-Israel yang biasanya dipenuhi pola negatif. Kendati demikian, terdapat perbedaan visi yang menjadi sebuah rintangan sebuah rintangan yang antar keduanya. Yordania mempertahankan permusuhan terhadap Israel dan tidak mengakui berbagai tindakan pencaplokan Israel serta menentang berbagai kekerasan terhadap Palestina (Eisenberg & Caplan, 2010).



Namun tindakan permusuhan tidak selalu sampai pada titik memutuskan hubungan mereka. Niatan tersebut bahkan dapat menjadi sebuah kerugian bagi Yordania. Bermusuhan dengan Israel dapat membatasi akses Yordania ke air vital, Israel dapat melobi AS untuk memotong bantuannya ke Yordania, dan mengabaikan ketentuan perjanjian itu bahwa. Hal ini akan melemahkan posisi Yordania dan dapat membuat Israel merasa tidak terhalang dalam gagasan lamanya untuk mengusir warga Palestina dari Tepi Barat (Nashashibi, 2014).

Penghapusan ancaman dari Israel memungkinkan Yordania untuk fokus pada penanganan ancaman regional, mengingat meningkatnya kekacauan regional dalam beberapa tahun terakhir. Seperti Suriah dan Irak yang sedang berada dalam kekacauan dan sedang berjuang dengan beban pengungsi yang besar.

Yordania juga dapat berfokus menyelesaikan masalah internal dan meningkatkan stabilitas negaranya. Selain mengurangi resiko ancaman luar, perjanjian tersebut membantu mendorong adanya kerja sama menuju kepentingan regional untuk keuntungan bersama (Yellinek, 2019).

## **2. Kerjasama Bilateral Yordania-Israel**

Yordania adalah negara satu-satunya dari dua negara arab yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel dan mempertahankan hubungan diplomatik yang aktif. Oleh karena itu, Yordania juga merupakan salah satu partner penting pagi bagi Israel di kawasan timur tengah. Hubungan diplomatik antara Yordania dan Israel pada dasarnya telah terjalin lama bahkan sebelum adanya penandatanganan perjanjian damai. Awal dari hubungan antara Yordania dan Israel ini terkesan konfliktual, namun seiring berjalannya waktu, hubungan keduanya mulai mendingin dapat dilihat pada Koferensi Madrid tahun 1991 yang bahkan menjadi tonggak awal yang mendorong adanya kesepakatan perjanjian damai. Walaupun dalam menjalin ikatan diplomatik masih sering disambut dengan permusuhan

maupun ketidaksetujuan dari masyarakatnya itu sendiri (United State Department of State, 1991).

Sejak penandatanganan perjanjian damai, sebagai salah satu bentuk implementasinya, Yordania-Israel juga meratifikasi sekitar 15 perjanjian bilateral di berbagai bidang diantaranya adalah bidang ekonomi, ilmiah, budaya dan pariwisata. Perjanjian dilakukan sebagai dasar hubungan damai yang dijalin antara Israel dengan Yordania (Jewish Virtual Library, 2019).

Bentuk hubungan damai keduanya dengan menjalin kerjasama diawali pada tahun 1996, yaitu saat penandatanganan *Qualifying Industrial Zone* (QIZ). Perjanjian ini terkait dengan sebuah program ekspor dimana Yordania dan Israel diberikan akses bebas cukai ke pasar Amerika Serikat untuk barang-barang produksi tingkat tertentu. Hasil dari perjanjian jalur perdagangan bebas ini yang menetapkan taman industri sebagai bagian dari kerja sama antara Israel dan Yordania dan dengan dukungan aktif dari pemerintah Amerika.

Program ini mendorong pertumbuhan ekonomi Yordania selain pasar menjadi terbuka luas, membuka lapangan kerja serta dapat mengundang investasi asing. Dimana pada 13 area QIZ disepanjang perbatasan Yordania dan Israel, pabrik-pabrik besar yang mayoritas didanai oleh investasi-investasi asing dari Asia. Selain itu juga membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat yordania hingga hampir 30.000 orang (Israel Ministry of Foreign Affairs, 2004). Sebagai hasil dari QIZ, pada empat bulan pertama program ini telah menyumbang sekitar 30% pada total pertumbuhan GDP Yordania. Ekspor Yordania ke AS meningkat dari \$13 juta pada tahun 1999 menjadi \$660 juta pada tahun 2003, dan akan mendekati \$1 miliar pada tahun 2004. Menjadikan AS sebagai salah satu mitra dagang terbesar Yordania (CRS, 2013).

Bidang ekonomi dan perdagangan merupakan bidang kerja sama yang paling signifikan antara Israel dan Yordania. Berdasarkan data pemerintah Yordania

mengatakan bahwa kerjasama perdagangan antara keduanya telah tumbuh dari \$13 juta pada tahun 1996 dan meningkat pada tahun 2003 mencapai hingga \$130 juta. Dalam ekspor-impor, Israel merupakan importir terbesar keenam Yordania. Dimana puncak tertingginya pada tahun 2004 mencapai \$130 juta dengan total sejak awal perjanjian mencapai \$260 juta. Sedangkan untuk ekspor Israel ke Yordania dihitung dari awal penandatanganan perjanjian mencapai \$400 juta. Hingga pada 2018, jumlah ekspor Yordania ke Israel telah mencapai \$180 juta. (Israel Ministry of Foreign Affairs, 2004).

Selain bidang perdagangan, hubungan bilateral keduanya juga dijalin terkait dengan pembagian air serta pemeliharaan lingkungan. Sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Damai tahun 1994, Israel akan menyediakan air untuk Yordania dengan jumlah sekitar 75 juta m<sup>2</sup> pertahunnya. Pada 2004 terjadi kemajuan dimana kedua negara membuat kesepakatan mengenai Saluran Laut Merah-Laut Mati, yaitu sebuah proyek yang memberikan solusi terkait masalah air di Yordania, serta melestarikan cekungan laut mati. Yordania-Israel juga aktif dalam merespon masalah polusi di Laut Merah dengan melakukan latihan bersamadi Teluk Eilat-Aqaba.

Kemajuan lain dapat dilihat pada kesepakatan yang dilakukan Israel, Yordania dan Palestina yang menandatangani perjanjian pembagian air senilai \$900 juta dalam bentuk MoU pada tahun 2013, berisi tiga gagasan utama yaitu pembagian air untuk mendukung pengelolaan sumber daya air yang langka di kawasan dan berkontribusi dalam pengembangan dan penemuan sumber daya air baru. Perjanjian tersebut mencakup rencana pembangunan pipa yang menghubungkan Laut Merah, Laut Mati dan pabrik desalinasi air. Setengah dari air yang terdesalinasi ini nantinya akan dibeli oleh Israel untuk dibagikan ke Palestina dan Yordania.

Melihat dari kebutuhan air Yordania yang belum memenuhi kebutuhan pertahunnya. Perjanjian tersebut juga

menyediakan peningkatan penjualan air ke Yordania dari Israel Seperti Tiberias dan Laut Galilea, melebihi jumlah yang ditentukan dalam perjanjian damai 1994. Semua pihak yang terlibat menyelesaikan perjanjian pada 26 Februari 2015, dan pada Maret 2016 diumumkan bahwa pipa akan mulai beroperasi pada 2017 (Jewish Virtual Library, 2019).

Sedangkan pariwisata dari Israel ke Yordania selalu berada ditingkat stabil sejak penandatanganan perjanjian damai. Sejak 2009 Israel telah mengalami peningkatan dalam jumlah dan presentase wisata yang berkunjung dimana mayoritas berasal dari negara-negara muslim, termasuk dari Yordania yang mencapai hingga sekitar 81.000 orang dengan total 150.000 turis yang melintasi perbatasan Israel-Yordania setiap tahun, dari kedua arah. Peningkatan arus turisme ini juga membuat adanya kerjasama yang melibatkan penggunaan Bandara Aqaba untuk penerbangan asal Eropa menuju Eliat. Dengan arus wisata yang ramai akan meningkatkan pendapatan agen-agen pariwisata kedua negara itu sendiri yang berdampak pada peningkatan perekonomian di bidang pariwisata (Jewish Virtual Library, 2019).

Kesepakatan kerjasama juga ditandatangani di bidang Kerjasama dan Pertanian Internasional. Dalam rangka kerjasama ini, kedua negara melakukan kunjungan oleh pakar-pakar pertanian masing-masing untuk belajar dan bertukar informasi tentang pertanian. Contohnya seperti lebih dari 15 pakar pertanian dari Israel telah mengunjungi Yordania. Dua delegasi dari Kementerian Pertanian Yordania baru-baru ini mengunjungi Israel. Kedua negara telah membentuk perusahaan patungan untuk pemasaran hasil pertanian, dengan pandangan untuk mengembangkan pasar baru untuk hasil pertanian yang ditanam di Lembah Sungai Jordan sebelah timur dengan bantuan teknologi Israel.

Pada 1996, Yordania dan Israel menandatangani perjanjian tentang hubungan ilmiah dan budaya yang akhirnya membuka beragam aktivitas dalam bidang ini.

Seperti pertukaran pelajar mahasiswa, kerjasama proyek penelitian hingga kunjungan-kunjungan akademik antar universitas yang ada di kedua negara tersebut (Israel Ministry of Foreign Affairs, 1998).

Dengan terbukanya dan berkembang pesatnya kerjasama ekonomi antara Israel dan Yordania, kedua negara mulai menemukan aspek-aspek baru dalam melaksanakan kerjasama. Pada 2016, *Jordan National Electric Power Company* (NEPCO) menandatangani kesepakatan gas dalam jangka 15 tahun senilai \$10 miliar dengan Israel untuk menstabilkan campuran pasokan energinya dan melindungi dari gangguan energi potensial (Yavne & Hoshovsky, 2019).

Dalam kesepakatan tersebut, Yordania akan mengimpor 250-300 juta kaki kubik gas alam perhari dari *Noble Energy* (Perusahaan gas Israel), yang diperkirakan kerjasama ini akan menyelamatkan keuangan negara hingga \$700 juta. Namun sayangnya kesepakatan ini ditolak oleh warga Yordania karena yang menganggap bahwa rencana ini adalah bentuk kapitalisasi Israel ke Yordania. Sehingga rencana ini menjadi terhambat dan mengalami penundaan dan belum ada rencana lanjutan (Ghazal, 2019).

### **3. Dinamika Hubungan Diplomatik Yordania-Israel**

Selama 20 tahun lebih pasca perjanjian damai, telah banyak terjadi hubungan kerjasama antara kedua Negara di berbagai bidang seperti yang dijelaskan diatas. Namun ternyata selama berjalannya perjanjian tersebut, hubungan Yordania dan Israel tidak selalu dipenuhi keharmonisan. Hubungan kedua negara ini memang terkesan bersifat dinamis, dimana hubungannya masih sering diwarnai dengan ketegangan dan konflik, namun ada waktu dimana keduanya berpegang pada perjanjian tersebut dan mencoba untuk memulihkan kembali hubungannya. Sering terjadinya ketegangan diplomatik antara kedua negara yang disebabkan berbagai faktor.

Pada tahun 2014, untuk pertama kalinya setelah perjanjian damai ditandatangani, Raja Abdullah II memutuskan untuk menarik *ambassador*-nya dari Israel. Ini

merupakan respon dari adanya permasalahan terkait bukit bait suci atau yang biasa disebut *Temple Mount* (siti suci tempat Masjid Al-Aqsa) dan juga penembakan terhadap hakim asal Yordania oleh tentara Israel.

Pada maret 2014, seorang hakim Yordania Raed Zeiter yang bekerja disalah satu pengadilan di Amman ditembak mati oleh pasukan Israel. Penembakan terjadi saat Zeiter sedang mencoba melewati jembatan Allenby, yaitu jembatan penyeberangan antara Yordania dengan West Bank (The Guardian, 2014). Kemudian pada bulan juli, pasukan Israel kembali melakukan penembakan terhadap dua warga Yordania di depan kantor kedutaan Israel di Amman. Pemerintah Israel mengatakan bahwa penembakan terjadi sebagai bentuk bela diri dari seorang pekerja yang mencoba menikam dan melukai pasukan penjaga tersebut. Adanya korban meninggal ini menyebabkan hubungan kedua negara menjadi sempat menegang (The Guardian, 2014). Ketegangan hubungan diplomatic keduanya tambah memanas saat terjadi keributan di Yerusalem.

Sesuai isi perjanjian 1994, area suci tersebut bersifat status quo dan tidak tersentuh dengan Yordania yang diberikan otoritas religius sebagai pengawas atau penjaga di area Yerusalem tersebut. Namun saat itu bentrokan yang memakan korban terjadi di depan gerbang masuk Masjid Al-Aqsa. Disebabkan karena pejabat Palestina yang mengatakan tentara Israel telah melanggar peraturan dan melewati perbatasan masjid, namun dibantah oleh pasukan Israel. Kericuhan diawali dari pasukan Israel yang masuk ke area Al-Aqsa. Dengan alasan menuduh fraksi Hamas sebagai pelaku hilangnya 3 remaja Israel tanpa disertai dengan bukti. Berujung dengan bentrok antara tentara Israel dengan sekitar 200 orang warga Yordania dan menyebabkan banyak korban luka-luka (Tuwo, 2014).

Akibatnya, Raja Yordania Abdullah II menyatakan menarik kembali Duta Besarnya dari Israel, merespon dari masalah penembakan dan memanasnya permasalahan di Yerusalem. Keributan ini menyebabkan situasi di sekitar

masjid Al-Aqsa menjadi tidak aman dan menghambat akses beribadah ke masjid (Heller & Al-Khalidi, 2014).

Hingga pada februari 2015 tepatnya tiga bulan setelah penarikan, Yordania memutuskan untuk mengembalikan duta besarnya ke Israel setelah keadaan di Masjid Al-Aqsa mulai tenang. Seminggu setelah pengembalian Duta Besar Yordania, Raja Abdullah II, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Sekretaris Negara AS John Kerry melakukan pertemuan untuk meredakan ketegangan (Jewish News, 2015).

Pada 2017 ketegangan diplomatik sempat terjadi kembali antara Yordania-Israel. Hal ini diawali penembakan yang dilakukan oleh seorang pasukan keamanan Israel kepada seorang pemuda yang menyerangnya menggunakan sebuah obeng. Pasukan Israel tersebut juga melukai pemilik tanah yang ada di tempat kejadian. Menyebabkan kedua korban tembak meninggal dunia. Insiden ini terjadi di rumah pasukan keamanan tersebut yang terletak di area kedutaan Israel.

Pada malam kejadian itu, Duta Besar Israel dan seluruh staff kedutaan Israel langsung dikumpulkan untuk di evakuasi kembali ke Israel. Tindakan ini pun mendapatkan kecaman dari Raja Abdullah II karena dianggap bersifat provokatif terhadap Yordania dan hanya mementingkan pertunjukkan politik dibanding mengutamakan keadilan (Maariv, 2017).

Akhirnya Israel pun memutuskan kembali mengirimkan duta besar dan staffnya, tetapi ditolak oleh Yordania. Kedutaan Israel pun di non-aktifkan hingga Israel setuju untuk melakukan proses hukum terhadap pelaku penembakan. Namun tuntutan tersebut tidak berhasil dilayangkan karena adanya kekebalan diplomatik.

Pada januari 2018, Israel akhirnya secara resmi melakukan permohonan maaf dan memberikan kompensasi atas pembunuhan tersebut, dengan keluarga korban telah menerima \$5 juta sebagai kompensasi secara keseluruhan. Penjaga yang membunuh mereka, tetap tidak dituntut oleh

Israel Setelah itu duta besar Israel yang baru pun dikirim ke Yordania dan kedutaan besar Israel di Yordania kembali resmi dibuka (Al Jazeera, 2018).

Ketegangan diplomatik yang terus naik turun membuat perjanjian damai antara Yordania-Israel ini memang cenderung dingin. Walaupun telah menjalin berbagai kerja sama, perdamaian antara keduanya masih terkesan belum tercapai sepenuhnya. Melihat banyaknya faktor penghalang untuk menjalin hubungan yang harmonis dan damai setiap saat. Hubungan keduanya pun makin renggang saat oktober 2018 Raja Abdullah II menyatakan bahwa Yordania akan membatalkan perjanjian damai dengan Israel (Al-Khalidi, Jordan says it won't renew peace treaty land deal with Israel, 2018).